



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD PURWANTORO
2. Jabatan : DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
3. NHK : 30022

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.767.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 567.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/205 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/33 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.250.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 536.500.000

1. MOBIL, CHEVROLET ORLANDO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BYSON 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 160 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
4. MOBIL, HONDA HONDA HRV 1.5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 390.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 540.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 734.522.621



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 6.578.772.621

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. ---
Rp. 6.578.772.621

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.